

OPINI TERHADAP TEKS EDITORIAL BERJUDUL “JANGAN ALERGI JADI OPOSISI”

Nindi Yulia Rahmat¹, Hendra Setiawan²

yuliarahmatnindi@gmail.com¹, hendra.setiawan@fkip.unsika.ac.id²

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Suara kritis oposisi memainkan peran penting dalam dinamika politik suatu negara. Terutama dalam konteks pembangunan bangsa, suara kritis oposisi dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah dan memastikan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pentingnya suara kritis oposisi dalam menyeimbangkan pembangunan bangsa, serta untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah dan konten terkait di platform YouTube. Teknik pengumpulan data meliputi pencarian kata kunci terkait peran oposisi dalam pembangunan negara, analisis kualitatif terhadap artikel dan video, serta identifikasi pola-pola dan temuan-temuan penting. Analisis data menunjukkan bahwa suara kritis oposisi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan pembangunan bangsa. Mereka memberikan kritik konstruktif, menawarkan alternatif kebijakan, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang sehat dan mendorong inovasi politik. Pentingnya suara kritis oposisi dalam pembangunan bangsa tidak bisa diabaikan. Mereka berperan sebagai pengawas utama pemerintah, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik.

Kata Kunci: suara kritis, oposisi, pembangunan bangsa.

PENDAHULUAN

Sejarah demokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa keberadaan oposisi memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Indonesia sebagai negara demokratis yang dinamis juga tidak luput dari peran oposisi yang penting dalam dinamika politiknya. Dalam konteks pembangunan, oposisi sering kali menjadi pengawas yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi (Yusrin & Salpina, 2019).

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, peran oposisi kembali menjadi sorotan. Sebagai bagian dari dinamika politik yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya suara kritis oposisi dalam penyeimbang pembangunan bangsa menjadi sangat relevan. Dalam konteks politik suatu negara, peran oposisi seringkali menjadi sorotan yang menarik perhatian banyak pihak. Oposisi, dengan segala perbedaan pandangan dan agenda politiknya, sering dianggap sebagai penyeimbang kekuasaan yang dapat memberikan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks pembangunan bangsa, suara kritis oposisi memiliki relevansi yang sangat penting dalam memastikan terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pentingnya suara kritis oposisi dalam penyeimbang pembangunan bangsa tercermin dari fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan memberikan kritik dan masukan konstruktif, oposisi dapat membantu mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran negara, suara kritis oposisi dapat membantu mengawasi penggunaan dana publik agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, suara kritis oposisi juga memainkan peran dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, oposisi dapat membantu memperbaiki sistem yang kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan bangsa karena terciptanya sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Noor, 2019).

Namun, dalam prakteknya, suara kritis oposisi seringkali dihadapi dengan tantangan dan hambatan. Stigma negatif yang melekat pada oposisi, terutama dalam konteks politik yang polarisasi, dapat menghambat efektivitas mereka dalam memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya suara kritis oposisi dan bagaimana memastikan agar suara tersebut dapat didengar dan dihargai dalam proses pembangunan bangsa.

Dengan memperdalam pengetahuan tentang peran oposisi dalam pembangunan bangsa, diharapkan kita dapat menghargai keragaman pandangan politik dan mendorong terciptanya dialog yang produktif antara oposisi dan pemerintah. Hal ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleks, penting untuk terus memperbaharui pemahaman kita tentang peran oposisi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa negara kita terus berkembang menuju arah yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran oposisi dalam proses pembangunan negara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup artikel dari jurnal ilmiah serta konten terkait yang diunggah di platform YouTube. Teknik pengumpulan data dari artikel jurnal melibatkan pencarian menggunakan kata kunci terkait dengan peran oposisi dalam pembangunan negara, demokrasi, dan kritik konstruktif. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan perspektif-perspektif yang muncul terkait dengan pentingnya suara kritis oposisi. Selain itu, teknik pengumpulan data dari video di YouTube melibatkan pencarian konten yang berkaitan dengan wawancara, diskusi, atau presentasi dari tokoh-tokoh politik, akademisi, atau aktivis yang membahas peran oposisi dalam pembangunan bangsa. Video-video tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengekstrak informasi penting terkait dengan sudut pandang oposisi, strategi kritik yang digunakan, dan implikasi dari suara kritis tersebut dalam pembangunan bangsa. Teknik analisis data yang digunakan dalam metode kualitatif deskriptif ini melibatkan proses pemahaman mendalam terhadap konteks, pola, dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlangsung merupakan momen penting dalam dinamika politik Indonesia. Dalam penelitian yang mendalam mengenai peran

oposisi dalam sistem demokrasi, terlihat bahwa setelah KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, perhatian beralih pada pentingnya kehadiran oposisi yang efektif dalam mengawasi pemerintahan baru.

Oposisi dalam konteks ini dianggap sebagai mitra penting pemerintah untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar dan tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa oposisi yang efektif tidak hanya sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara

1. Konteks Pemilu 2024 dan Pemerintahan Baru

- Pemilu 2024 telah berlangsung dengan hasil penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia.
- Periode pemerintahan baru dari Oktober 2024 hingga 2029 menantang untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan ekonomi dan pembenahan marwah demokrasi.

2. Peran Oposisi dan Kelompok Kritis

- Oposisi dan kelompok kritis diperlukan sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pemerintahan baru.
- Mereka tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga harus memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi bangsa.

3. Pentingnya Check and Balance

- Oposisi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pemerintahan tidak berjalan tanpa kontrol yang memadai.
- Tanpa oposisi, potensi pemerintahan menjadi otoriter dan berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat.

4. Peran Oposisi dalam Inovasi Politik

- Oposisi dapat mendorong inovasi politik dengan menantang status quo dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
- Mereka juga bertugas untuk mengingatkan pemerintah tentang janji-janji kepada rakyat dan memastikan kebijakan selalu berpihak pada kepentingan publik.

5. Kerja Sama Antara Oposisi dan Pemerintah

- Meskipun berperan sebagai penyeimbang, oposisi juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah besar yang memerlukan solusi bersama.
- Ini merupakan bagian dari dinamika politik yang sehat, di mana semua pihak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembahasan

Pemilu 2024 dan Kepemimpinan Baru

Pemilu 2024 merupakan salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah Indonesia modern. Pemilihan ini dilaksanakan dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah, serta kepala daerah di berbagai wilayah. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momen penting untuk menilai dan menguji kembali komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilu 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari teknis pelaksanaan hingga dinamika politik yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah

memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan di tengah dinamika politik yang penuh persaingan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam menyelenggarakan pemilu dengan mematuhi peraturan yang ketat dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar. Selain itu, isu-isu seperti disinformasi, hoaks, dan manipulasi data menjadi tantangan besar dalam pemilu ini. Kampanye negatif dan penyebaran berita palsu di media sosial berpotensi mempengaruhi opini publik dan mencederai proses demokrasi (Muldani et al., 2019).

Pada pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya memenangkan pemilu setelah melalui proses pemilihan yang ketat dan kompetitif. Penetapan ini menandai awal dari pemerintahan baru yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara. Prabowo Subianto, seorang politisi veteran dengan latar belakang militer, membawa pengalaman dan visinya dalam memimpin negara. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, membawa perspektif yang lebih muda dan inovatif dalam pemerintahan. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mengelola negara.

Kepemimpinan baru Prabowo-Gibran memiliki visi untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Salah satu prioritas utama mereka adalah peningkatan ekonomi dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, peningkatan investasi, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang ketahanan nasional, mereka berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, memberantas korupsi, serta memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Selain itu, Prabowo-Gibran berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, dengan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik (Syafirullah et al., 2019).

Meskipun memiliki visi yang ambisius, kepemimpinan Prabowo-Gibran dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Tantangan ekonomi global, ketidakstabilan politik dalam negeri, serta isu-isu sosial dan lingkungan menjadi beberapa faktor yang perlu diatasi. Selain itu, keberhasilan pemerintahan juga sangat bergantung pada kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk oposisi dan masyarakat sipil. Harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan baru ini adalah terciptanya stabilitas politik, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan tercapainya kemajuan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat membawa perubahan positif yang nyata dan mewujudkan visi besar mereka untuk Indonesia. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dan peran media sebagai pengawas yang kritis juga sangat penting. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan pemerintahan dapat bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya Peran Oposisi dalam Demokrasi

Oposisi memiliki beberapa fungsi utama yang esensial dalam sistem demokrasi. Pertama, mereka menjalankan peran pengawasan dengan memantau setiap tindakan dan kebijakan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, oposisi

memberikan kritik konstruktif, memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat atau merugikan masyarakat. Ketiga, mereka berperan sebagai penyedia alternatif dengan menawarkan solusi dan kebijakan yang dianggap lebih efektif dan bermanfaat. Selain itu, oposisi juga berfungsi untuk edukasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting melalui debat dan diskusi. Terakhir, mereka menjaga keseimbangan kekuasaan dengan mencegah dominasi dan monopoli kekuasaan oleh satu pihak (Khamim et al., 2019).

Oposisi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Seringkali, oposisi dipandang sebagai lawan yang harus dikalahkan atau bahkan dimusnahkan. Namun, pemahaman ini keliru karena oposisi sebenarnya berfungsi sebagai mitra tanding yang sangat diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalurnya. Penting untuk diingat bahwa oposisi memainkan peran sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun oposisi tidak memiliki akses langsung kepada kekuasaan, peran mereka dalam mengawasi dan mengkritisi pemerintah sangat vital untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Banyak orang mungkin enggan menjadi bagian dari oposisi karena khawatir akan keselamatan dan stabilitas kehidupan mereka jika berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa. Namun, keberadaan oposisi yang kuat dan independen adalah elemen yang tidak bisa diabaikan dalam demokrasi yang sehat (Hasdiana, 2019).

Contoh nyata pentingnya peran oposisi bisa dilihat pada pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi di Indonesia, di mana koalisi pendukungnya menguasai 81% kursi di parlemen. Meski demikian, banyak legislasi yang masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi, beberapa di antaranya bahkan dibatalkan atau direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa kritik dan pengawasan dari oposisi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa legislasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan konstitusi.

Oposisi yang efektif tidak hanya sekadar memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi alternatif dan memberikan catatan kritis yang konstruktif. Kualitas legislasi dan kontrol terhadap pemerintah harus terus ditingkatkan, dan di sinilah peran oposisi menjadi sangat krusial. Misalnya, ada banyak proyek infrastruktur yang setelah dibangun ternyata tidak berfungsi dengan baik. Kehadiran oposisi yang kompeten dan bermutu sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pemerintah bisa menerima kritik dengan dewasa dan bijaksana dari oposisi. Pemerintah yang matang dan demokratis seharusnya mampu mendengarkan kritik, mempertimbangkan usulan-usulan yang konstruktif dari oposisi, dan mengintegrasikannya ke dalam program pembangunan. Ini adalah tanda dari pemerintahan yang benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Singkatnya, oposisi adalah elemen yang esensial dalam demokrasi. Mereka memastikan bahwa suara minoritas didengar, kebijakan pemerintah diawasi, dan bahwa ada alternatif yang ditawarkan. Tanpa oposisi, pemerintahan cenderung menjadi otoriter dan kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu, peran oposisi harus dihargai dan didukung sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi baik (Muhajir & Wulandari, 2019).

Peran Pengawasan dan Penyeimbang oleh Oposisi

Peran pengawasan dan penyeimbang oleh oposisi sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan jelas membutuhkan mitra yang kritis dan konstruktif untuk menghadapinya. Penting untuk memahami bahwa definisi mitra dalam konteks ini bukan berarti semua kekuatan politik harus bergabung dalam pemerintahan. Sebaliknya, agar pemerintahan baru dapat berjalan dengan sehat dalam iklim demokrasi yang kuat, diperlukan adanya oposisi dan kelompok kritis sebagai pengawas dan penyeimbang. Jika semua kekuatan politik larut dalam pusaran kekuasaan, upaya untuk mencapai kemajuan yang diinginkan oleh semua kalangan akan sulit terwujud. Tanpa adanya pengawas, pengkritik, dan penyeimbang, kemajuan dan kemakmuran bisa jadi sekadar angan-angan.

Peran oposisi dan kelompok kritis ini bisa dimainkan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, pers, hingga partai politik yang ada di parlemen. Idealnya, sebagian dari para politikus yang ada di Senayan harus memainkan fungsi sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar mewakili kepentingan golongan, kelompok, atau bahkan pribadi. Dalam sistem demokrasi, partai atau kelompok oposisi memainkan peran yang sangat kritis. Mereka mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Tanpa pengawasan yang efektif dari oposisi, pemerintahan dapat berjalan sesukanya dan berpotensi sewenang-wenang (Noor, 2019).

Fungsi pengawasan oleh oposisi meliputi berbagai aspek. Oposisi bertanggung jawab untuk menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintah, mengungkapkan segala bentuk penyimpangan atau korupsi, serta menyajikan alternatif kebijakan yang lebih baik. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga publik, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah diawasi dengan ketat dan transparan. Di parlemen, oposisi menggunakan berbagai alat pengawasan seperti interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan eksekutif. Sidang-sidang parlemen, komisi-komisi khusus, dan penyelidikan juga merupakan sarana penting bagi oposisi untuk memeriksa kebijakan pemerintah secara mendalam.

Selain itu, oposisi berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mereka memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak menjadi absolut dan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma demokrasi. Dengan mengajukan kritik konstruktif dan alternatif kebijakan, oposisi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, oposisi memaksa pemerintah untuk selalu bertanggung jawab kepada rakyat, mendorong mereka untuk menjalankan tugas dengan integritas dan keterbukaan.

Namun, peran oposisi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Di beberapa negara, oposisi menghadapi represi politik yang membatasi kebebasan mereka untuk beroperasi. Intimidasi, penangkapan, dan undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi adalah beberapa bentuk represi yang dapat menghalangi oposisi dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, oposisi sering kali memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintah, termasuk keterbatasan dana, akses ke media, dan dukungan logistik. Polarisasi politik yang tinggi juga dapat memperburuk kerja sama antara oposisi dan pemerintah, menciptakan ketegangan yang mengarah pada kebuntuan politik. Kurangnya dukungan publik juga dapat melemahkan posisi oposisi, membuat suara mereka menjadi kurang signifikan dan lebih mudah diabaikan oleh pemerintah (Hakim et al., 2019).

Dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi tidak hanya terdiri dari partai politik di parlemen. Peran pengawasan dan penyeimbang juga dimainkan oleh media massa, organisasi masyarakat sipil, individu, dan akademisi. Media yang bebas dan independen berfungsi sebagai pengawas independen terhadap tindakan pemerintah, menginvestigasi dan mengungkap penyimpangan, serta memberikan informasi yang objektif kepada publik. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak masyarakat, dan melakukan kampanye kesadaran. Individu, termasuk akademisi dan intelektual, berkontribusi melalui penelitian, publikasi, dan debat publik, memberikan perspektif berbasis bukti dan analisis mendalam yang memperkaya diskusi publik tentang kebijakan dan tindakan pemerintah.

Check and Balance dalam Sistem Demokrasi

Pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang adalah bagian dari jantung demokrasi yang sehat, yakni adanya sistem check and balance. Sistem ini mengharuskan adanya pengajuan pertanyaan kritis terhadap kebijakan yang akan, sedang, dan telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan yang diambil pemerintah dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat, oposisi harus menyampaikan kritik yang konstruktif dan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik. Fungsi ini menuntut oposisi untuk tidak hanya mengkritik secara membabi buta, tetapi juga melakukan kajian dan analisis mendalam sehingga kritik yang disampaikan berdasar dan solutif (Rohmah, 2019).

Sebagai pemilih, kita memiliki pengalaman buruk selama masa Orde Baru di Indonesia, di mana demokrasi dimonopoli oleh elit yang berkuasa. Pada masa itu, demokrasi tidak memberikan ruang bagi oposisi yang kuat dan kritis. Persaingan politik diharamkan dan segala keputusan diambil melalui kompromi yang dipaksakan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Budaya politik Orde Baru ini mengajarkan kita bahwa pemerintahan tanpa oposisi cenderung tidak tahu diri dan sewenang-wenang. Tidak adanya kontrol dan pengawasan yang efektif menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan keputusan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Pelajaran mahal dari era tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran oposisi dalam sistem demokrasi.

Oleh sebab itu, peran oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi karena membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan atau kelompok saja. Dengan adanya oposisi yang kuat, ada mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan yang berkesinambungan terhadap pemerintah. Oposisi bertindak sebagai pengawas yang menjaga agar pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil melalui proses yang transparan dan akuntabel. Sistem check and balance ini merupakan esensi dari demokrasi yang sehat, di mana kekuasaan yang tersebar dan terdistribusi dengan baik dapat mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas pemerintahan.

Oposisi yang efektif juga berperan dalam menyediakan solusi dan rencana alternatif yang lebih baik untuk publik. Mereka tidak hanya bertugas untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga untuk menawarkan visi yang berbeda dan strategi yang lebih baik. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan dan bisa menilai mana yang terbaik bagi mereka. Ini mendorong persaingan yang sehat dalam politik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah telah melalui pertimbangan yang matang dan diskusi yang komprehensif. Pada akhirnya, peran oposisi yang kuat dan kritis memastikan bahwa demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sistem

pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan wewenang.

Menerima Oposisi sebagai Bagian dari Budaya Politik Sehat

Oposisi harus diterima sebagai bagian dari budaya politik yang sehat. Mereka tidak boleh dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan, melainkan sebagai elemen penting dalam sistem politik. Partai politik juga tidak boleh merasa hina untuk menjadi oposisi. Kita bukan lagi hidup di zaman totalitarian, di mana semua suara harus seirama dengan pemerintah. Keberadaan oposisi yang efektif dan berfungsi dengan baik justru adalah tanda sehatnya demokrasi suatu negara. Keberadaan mereka menunjukkan adanya kebebasan berpendapat dan mekanisme check and balance yang berfungsi dengan baik.

Dalam konsep demokrasi Pancasila, meskipun ada interpretasi yang subjektif, esensi dari demokrasi itu sendiri tetap menghendaki adanya oposisi. Tafsir seperti demokrasi terpimpin, yang tidak termasuk dalam varian demokrasi sejati, menunjukkan pentingnya keberadaan oposisi sebagai penyeimbang. Menurut pendapat ekstensif oleh Larry Diamond dan lainnya, kekuatan oposisi memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem demokrasi. Mereka bertindak sebagai pengawas utama pemerintah, memantau kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah, serta menghadirkan alternatif kebijakan. Tanpa alternatif kebijakan, pemerintahan menjadi monolitik dan cenderung stagnan. Selain itu, oposisi juga berperan dalam menjaga perimbangan kekuasaan, mencegah pemerintah menjalankan kekuasaannya secara autokratis (Munadi, 2019).

Fungsi pendidikan politik dan inovasi politik juga termasuk dalam peran oposisi. Dengan menantang status quo, oposisi mendorong inovasi politik dan reformasi. Mereka memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Oposisi bukan hanya sekadar penyedia kritik tanpa dasar, tetapi juga memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi bangsa. Penting untuk diingat bahwa peran oposisi bukanlah untuk menghancurkan pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Mereka harus memberikan kritik yang konstruktif, menawarkan alternatif yang realistis, dan terus mendorong pemerintah untuk bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas.

Demokrasi yang sehat tidak bisa berjalan tanpa adanya oposisi yang kuat. Sebagai pengawas pemerintah, oposisi berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tanpa oposisi, pemerintah bisa menjadi otoriter dan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka ruang bagi oposisi untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, oposisi juga harus menjalankan perannya dengan tanggung jawab dan tidak semata-mata mencari kesalahan pemerintah. Peran oposisi yang efektif adalah dengan memberikan kritik yang membangun, menawarkan solusi, dan tetap menjaga dialog yang konstruktif dengan pemerintah (Hakim et al., 2019).

Dengan demikian, kita semua memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi. Masyarakat harus aktif dalam memberikan dukungan kepada oposisi yang sehat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan demokrasi yang kita jalani semakin matang. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang terbuka terhadap kritik dan saran, serta yang selalu siap untuk memperbaiki diri, adalah ciri dari demokrasi yang kuat dan sehat. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk oposisi, sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan adil.

Tantangan dan Stigma Negatif terhadap Oposisi

Dalam konteks Indonesia, peran oposisi juga sangat penting dalam menciptakan inovasi politik. Dengan menantang status quo, oposisi dapat mendorong terjadinya perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Mereka harus terus mengingatkan pemerintah tentang janji-janji yang telah dibuat kepada rakyat, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik. Namun, inovasi politik yang dibawa oleh oposisi sering kali disalahpahami atau disalahartikan sebagai bentuk perlawanan yang destruktif. Ini menambah beban bagi oposisi untuk membuktikan bahwa kritik dan saran mereka bertujuan untuk perbaikan dan bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah.

Namun, menjadi oposisi bukan berarti harus selalu bertentangan dengan pemerintah. Di beberapa kesempatan, oposisi juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah besar yang memerlukan solusi bersama. Ini adalah bagian dari dinamika politik yang sehat, di mana semua pihak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Kolaborasi antara oposisi dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai kerja sama yang efektif, diperlukan rasa saling menghormati dan komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak (Shofan, 2019).

Tantangan lain yang dihadapi oposisi adalah menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami peran dan fungsi mereka. Stigma ini bisa berasal dari kesalahpahaman atau informasi yang tidak akurat mengenai peran oposisi dalam demokrasi. Oposisi sering kali dianggap sebagai penghalang pembangunan atau pihak yang hanya mencari-cari kesalahan pemerintah. Padahal, kritik yang konstruktif dari oposisi bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Untuk mengatasi stigma ini, oposisi perlu terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa kritik yang mereka sampaikan didasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam.

Selain itu, oposisi juga harus berhadapan dengan tantangan internal, seperti menjaga kohesi dan konsistensi dalam barisan mereka sendiri. Konflik internal atau perpecahan dalam tubuh oposisi dapat melemahkan posisi mereka dan mengurangi efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, oposisi perlu memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang jelas dan solid, serta mampu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya. Dengan demikian, oposisi dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam konteks Pemilu 2024 dan kepemimpinan baru Prabowo-Gibran, peran oposisi menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi Indonesia. Oposisi bukan hanya sekadar lawan yang harus dikalahkan, melainkan mitra yang kritis dan konstruktif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Dengan memberikan kritik yang konstruktif, menawarkan solusi alternatif, dan menjaga keseimbangan kekuasaan, oposisi berperan sebagai penjaga integritas demokrasi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk stigma negatif dan tantangan internal, oposisi tetap merupakan elemen penting dalam membangun sistem politik yang sehat dan berfungsi baik. Dengan demikian, peran oposisi harus diakui, dihargai, dan didukung sebagai bagian integral dari budaya politik yang sehat dan berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2019). Demokrasi Minim Oposisi: Narasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 10(3), 647–683.
- Hasdiana, U. (2019). PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM AL-QU'RAN “Studi Analisis Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al- Azhar.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 303–355. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Khamim, S., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2019). Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 2027–2042.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2019). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Muldani, T., Swarnawati, A., & Muksin, N. N. (2019). Publisitas Politik Aceng Aziz Muslim Menuju Pemilihan Umum 2024 di Facebook Trisno. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 47–56.
- Munadi. (2019). Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 1–20.
- Noor, F. (2019). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 46(1), 1–17.
- Rohmah, M. M. S. N. (2019). Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 10(2), 485–496. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31971/pdf>
- Shofan, M. (2019). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia. *Maarif*, 14(1), 3–8. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30>
- Syafirullah, L., Hafsarrah Maharrani, R., Bahroni, I., Vikasari, C., & Cilacap, P. N. (2019). Perbandingan Metode AHP dan ANP Pemilihan Presiden Tahun 2024 Generasi Milenial Politeknik Negeri Cilacap. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 42.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2019). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>